BAB V

KESIMPULAN

Kemenangan dan berkuasanya partai AKP di Turki merupakan sebuah peristiwa bersejarah yang membawa Turki kepada perubahan yang baru. Partai AKP mencoba untuk mengkombinasikan antara ideologi sekuler yang telah mengakar di Turki dengan identitas Islam yang dimiliki mayoritas penduduk Turki, tujuannya adalah untuk menyatukan sebuah perbedaan karena jika mempertahankan salah satu dan menghilangkan yang lainnya maka akan menimbulkan sebuah perpecahan, untuk itu perubahan yang dibuat merupakan sebuah tantangan baru bagi partai AKP untuk menggunakan nilai-nilai keislaman, ideologi sekuler maupun budaya demokrasi yang dapat diterima masyarakat. Erdogan meyakinkan bahwa agama bukanlah faktor kemunduran sebuah negara, pernyataan ini diperkuat dengan perkataan Erdogan yang mengecam sistem pendidikan sekuler di masa lalu yang bertujuan untuk melahirkan sebuah generasi yang tidak mempunyai nilai-nilai agama dan moral sehingga orang-orang mudah terisolasi dari nilai-nilai agama, moral mereka.

Perubahan ini tentunya mempengaruhi ldentitas dan langkah Turki untuk membuat kebijakan didalam maupun luar negeri . Perubahan kebijakan didalam negeri mulai terlihat ketika budaya demokratisasi di Turki mulai berkembang dan konstitusi sekuler tidak sekaku seperti periode sebelum partai AKP berkuasa, kebebasan rakyat seperti penggunaan Hijab untuk wanita, menggunakan adzan dalam bahasa Arab, dan menambah pelajaran agama di sekolah maupun mendirikan sekolah-sekolah Islam sudah dilakukan. Partai ini juga tidak

menentang ataupun menghapus ideologi sekuler, tujuannya agar tidak terjadi kerusuhan di dalam pemerintahnya.

Politik luar negeri Turki juga mengalami perubahan yang semula kedekatannya dengan kawasan Barat sangat erat kemudian perlahan mulai menarik kedekatannya dengan Barat, Turki merubah doktrin politik luar negerinya menjadi konsep *Strategic Depth*, konsep ini memiliki empat prinsip utama yaitu : 1. *Zero Problem With Neighbours*, 2. *Outreach To Adjacent*, 3. *Multi-dimensional Foreign Policy*, *Rhythmic Diplomacy*. Dengan begitu, diharapkan dengan menggunakan strategi politik luar negeri Turki yang baru menjadi sebuah kemajuan bagi Turki di kanca internasional tanpa harus melalui pembatasan dan pengisolasian diri, melainkan dengan keterbukaan dan penerapan politik *Soft Power* kepada negara tetangga.

Bantuan kemanusiaan Turki di Rohingya merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintahan Turki dibawah partai AKP, kedatangan mereka untuk menunjukkan bahwa perhatian Turki tidak hanya dikawasan Timur dan barat saja, keterbukaan dan penerapan politiknya membawa Turki hingga ke Asia, pemerintahan Turki mengharapkan dapat menjadi pemain utama dalam kanca internasional yang menjembatani tiap-tiap kawasan yang berkonflik. Kedatangan Turki ke Myanmar khususnya di daerah yang sedang terjadi konflik adalah untuk membantu etnis Rohingya dan mengajak pemerintah Myanmar bekerja sama dalam menyelesaikan masalah ini dengan damai, karena kerusuhan yang terjadi pada tahun 2012 antara umat Buddha dan Muslim menjadi isu internasional yang menjadi perhatian dunia, bersama dengan lembaga-lembaga internasional seperti

PBB melalui UNHCR, OKI dan IHH, Turki mengajak Myanmar berupaya untuk menyelesaikan kasus ini secepatnya.

Isu terkait pengungsi internasional bukan lah sebuah masalah yang dapat ditangani dengan mudah, apalagi kasus yang terjadi kepada Etnis Rohingya karena tidak diakuinya kewarganegaraan Etnis tersebut levelnya sudah mencapai tingkat internasional, maka dari itu Turki tidak bertindak sendirian, bersama dengan lembaga internasional lainnya, Turki memberikan sejumlah kebutuhan makanan, fasilitas (camp dan rumah sakit), dan keamanan untuk Rohingya. Bantuannya tidak hanya di daerah yang berkonflik saja tetapi untuk semua korban yang berada di Rakhine (Arakan), tujuannya agar tidak ada pandangan buruk terkait bantuan Turki yang hanya memberikan bantuan untuk sejumlah pihak saja (Islam), dan ini akan menimbulkan sebuah kecemburuan sosial.

Bantuan yang diberikan bukan hanya disekitar wilayah yang terjadi konflik saja, tetapi bersama dengan angkatan bersenjata Turki, pemerintah juga mencari para korban yang lari dan mencari tempat mengungsi di wilayah lain. Turki memperkirakan korban pengungsi akan sampai di perbatasan negara lain maka dari itu pemerintahan Turki mengajak pemerintah Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk membantu jika para pengungsi sampai ke negaranya. Perhatian yang diberikan Turki untuk Etnis Rohingya dari 2012 hingga 2016 mendapat apresiasi dari Aung San Suu Kyi, ia berharap bahwa negara lain juga peka seperti yang dilakukan negara Turki untuk membantu pemerintahan Myanmar mencari solusi dan jalan keluar terkait isu kemanusiaan.

Dalam penelitian yang menggunakan pendekatan konstruktivisme ini mencoba untuk menjelaskan bahwa hubungan identitas dapat mempengaruhi pengambilan kebijakan sebuah negara, kemudian identitas juga dapat memunculkan sebuah perilaku negara terhadap negara lain. Dan ini terlihat ketika sebuah identitas penguasa Turki yang beragama Islam kemudian mengambil sikap kepada Etnis Rohingya yang memiliki kesamaan identitas untuk membantu. Kerusuhan yang menimpa Etnis Rohingya ini tentunya tidak bisa membuat pemimpin Turki berpaling terhadap saudara-saudaranya yang tertindas, karena ini merupakan salah satu tugas seorang Muslim untuk saling membantu dan melindungi saudaranya (Rohingya) yang membutuhkan bantuan, tidak hanya bertindak sendiri, Turki juga meminta kepada negara-negara Muslim untuk melindungi saudara-saudara Muslim yang terjajah dan tertindas yang berada di belahan dunia.

Tidak hanya sebatas identitas religius saja yang coba dibangun oleh Turki dibawah kepemimpinan partai AKP, partai ini juga menjadikan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan kebebasan sebagai sebuah sistem berpikir, ide-ide, gagasaan dan gambaran untuk meembangun sebuah budaya (diskursus) partai, dan ini terlihat saat tindakan Turki dibawah kepemimpinan partai AKP dalam menjalankan tugasnya sebagai salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, negara-negara yang telah ikut meratifikasi harus membantu dalam menjalankan fungsi dan tujuan UNHCR untuk mencarikan solusi maupun jalan keluar terhadap masalah pengungsi. Ditambah identitas Turki saat ini yang mulai menjujung tinggi demokrasi dan hak asasi

manusia. Maka, ini merupakan salah satu tugas dan kewajiban Turki untuk membuktikan bahwa negara Turki menjunjung tinggi HAM dengan mencegah pelanggaran-pelanggaran terkait isu kemanusiaan.

Meskipun menolak bahwa partainya bukan partai Islam akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Erdogan juga memasukkan nilai-nilai Islam dalam kebijakannya dan mencoba membangun kembali nilai-nilai Islam yang runtuh di negaranya. Pengaplikasian ideolagi Sekuler, Demokrasi, dan Islam yang dilakukan sangat baik dan mampu beradaptasi di tengah-tengah kehidupan masyarakat, hal ini membuat partai AKP masih berjaya dan masih tetap memegang kekuasaan di Turki, dikarenakan partai ini masih mendapatkan kepercayaan dari rakyat untuk memimpin hingga saat ini.